



# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2023 - 2026**

**DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BOALEMO**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang dicurahkan-Nya, sehingga tersusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2023 - 2026.

Kami menyadari bahwa sajian dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari hasil yang diharapkan namun setidaknya sudah dapat menggambarkan kondisi minimal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo dari maksud dibuatnya laporan ini.

Atas kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam membantu, mengarahkan dan merampungkan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin..

Tilamuta, April 2022

**KEPALA DINAS**



**Dra. MONRU MOPANGGA**  
**NIP. 19660903 199702 2 002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD .....	31
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>33</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	33
3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah .....	33
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	44
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	46
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>53</b>
5.1 Strategi.....	53
5.2 Kebijakan.....	53
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>99</b>
<b>BAB VIII : PENUTUP.....</b>	<b>102</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

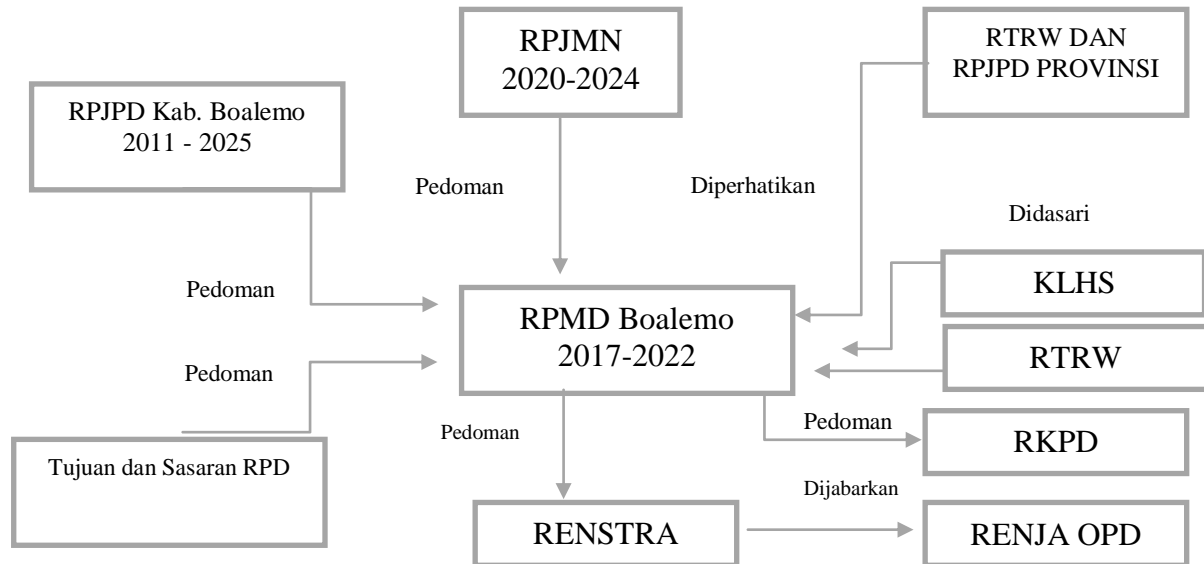
#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Namun dengan adanya Instruksi Menteri dalam Negeri No 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022,

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep Rancangan awal sampai dengan rancangan Akhir renstra hingga ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 - 2026.

Proses penyusunan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 - 2026. Dalam hal ini Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama periode 4 (empat) tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat

Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahunan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini.



**Gambar 1. Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**

Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa merupakan acuan bagi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Juga sebagai panduan dalam penyusunan pelaksanaan, evaluasi program kebijakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2023 – 2026.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SOPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
  14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo 2012 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
26. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang susunan organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
27. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah Tahun 2023 – 2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo 2023-2026 disusun sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan bidang urusan sosial dan PMD, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo setiap tahunnya serta sebagai pedoman bagi seluruh personil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk empat tahun mendatang.

#### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo Boalemo 2023-2026 disusun dengan tujuan:



1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boalemo dalam penyusunan penganggaran selama 4 (empat) tahun periode Renstra
4. Sebagai dasar bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 4 (empat) tahun periode Renstra

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2023 – 2026 ini disusun dengan Outline sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **1. Tugas dan Fungsi**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo merupakan salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016.

Terbentuknya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo sebagai salah satu organisasi/perangkat daerah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

##### **a. Tugas**

Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

##### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2022, Dinas Sosial dan PMD menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dalam lingkup tugas dinas;
4. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa serta memberikan laporan dan penyuluhan;

6. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan fakir miskin;
4. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan jabatan dalam organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pemberdayaan dan Penanganan fakir miskin, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah tanggung jawab Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis, lingkup perencanaan pelayanan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa secara terpadu agar sasaran pelaksanaan sesuai harapan.
- b. Mengkoordinasikan program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor, berdasarkan tugas dan fungsi agar pelaksanaan efisien dan efektif;
- c. Membina dan mengarahkan unit terkait berdasarkan pedoman agar terciptanya keterpaduan program;
- d. Menyenggarakan ketatausahaan unit berdasarkan aturan yang ada untuk tertibnya administrasi perkantoran;
- e. Menindaklanjuti program/kegiatan Administrasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa secara teknis dalam lingkup kewenangan agar adanya kesinambungan program;

- f. Mengevaluasi program/kegiatan lintas sektor berdasarkan rencana kerja agar diperoleh data yang akurat yang berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan dan desa;
- g. Melaporkan hasil program/kegiatan kepada pimpinan dalam bentuk dokumen sebagai laporan hasil pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan serta penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja Dinas;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan operasional perencanaan, administrasi umum, ketatausahaan, perpustakaan, arsip, kepegawaian, kehumasan, protokol, pengelolaan perlengkapan rumah tangga badan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup sekretariat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis di bidang sekretariat;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- f. Memfasilitasi penyusunan bahan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Memfasilitasi penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan (SP);
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- l. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- m. Memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

*1. Sub Bagian Keuangan*

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan keuangan lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menatausahakan pengelolaan keuangan;
- b. Menghimpun dan mengolah data keuangan;
- c. Menyusun laporan keuangan SKPD;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
- e. Meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran;
- f. Menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
- g. Menyiapkan dan menerbitkan SPM;
- h. Mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
- i. Mengelola pembayaran gaji pegawai;
- j. Mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;

- k. Membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
- l. Membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak;
- m. Membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- n. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- o. Secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA;
- p. Menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q. Menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

## 2. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- d. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
- e. Mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- f. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;
- g. Pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
- h. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- i. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;

- j. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- l. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
- n. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- o. Menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- p. Menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- q. Menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
- r. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
- s. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- t. Melaksanakan tugas kehumasan;
- u. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- v. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang) dan kearsipan dinas;
- w. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
- x. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

### 3. *Kelompok Jabatan Fungsional*

#### 1. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan penanganan sosial dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang program kedinasan.



Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan perencanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan penanganan Fakir Miskin;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan penanganan Fakir Miskin;
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan penanganan Fakir Miskin;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan penanganan Fakir Miskin;
- e. Mengkoordinasikan laporan secara berkala;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan perencanaan program kegiatan di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- d. Mengkoordinasikan laporan secara berkala;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal dan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

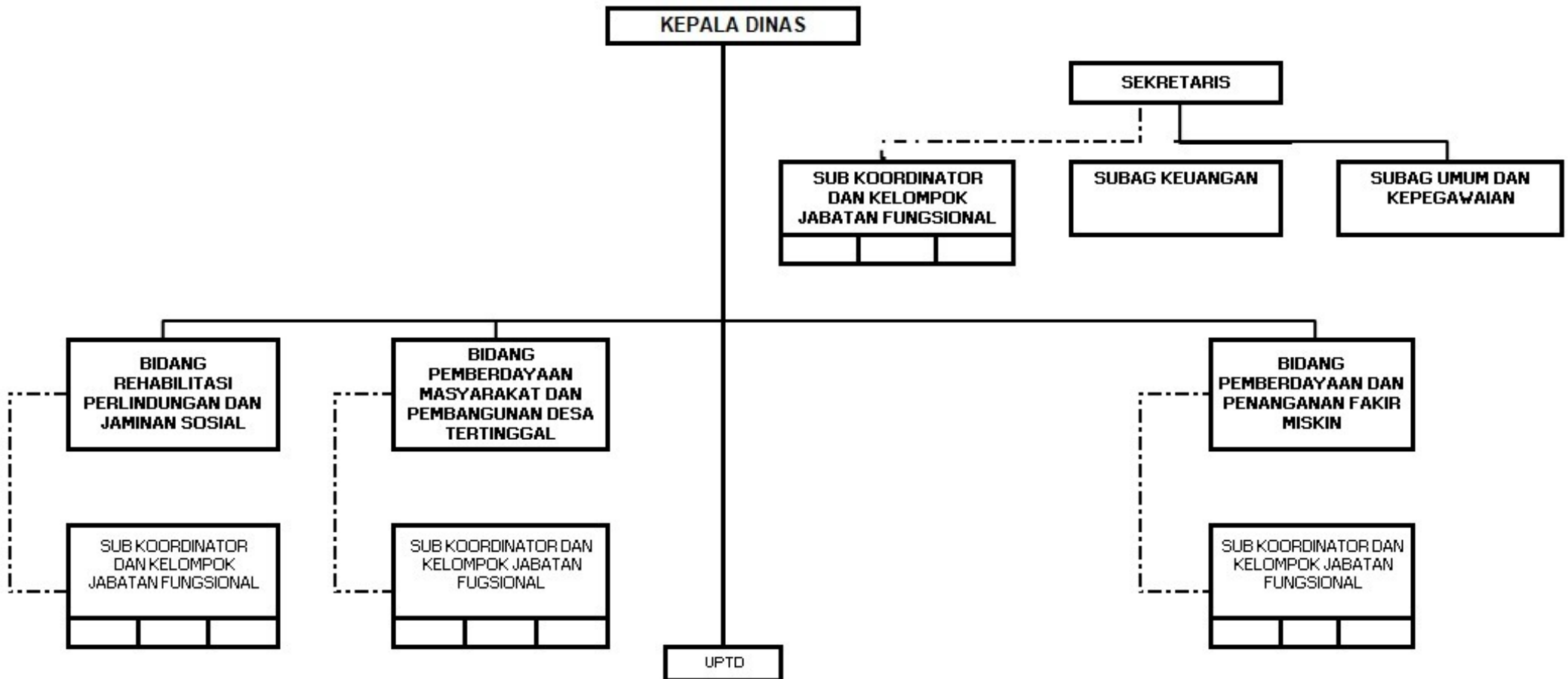
- a. Menyusun rencana kegiatan operasional bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
- b. Melaksanakan kebijakan dibidang pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
- c. Melaksanakan koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
- d. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
- f. Melaksanakan pemantaun, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
- g. Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa;
- h. Fasilitasi Peningkatan Kerja Sama Antar Desa;
- i. Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- j. Membagi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal;
- k. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas dan fungsi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yang telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BOALEMO

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo memiliki sumber daya manusia, asset/modal, yang diuraikan sebagai berikut :

### 2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

#### SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Golongan IV	2	2	3	
Golongan III	9	12	22	
Golongan II	4	3	7	
Golongan I	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	

#### SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal

Pendidikan Formal	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Setingkat Doktor (S3)	0	0	0	
Setingkat Magister (S2)	1	1	2	
Setingkat Sarjana (S1)	7	11	18	
Setingkat Diploma	2	2	4	
Setingkat SLTA	5	3	8	
Setingkat SLTP	-	-	-	
Setingkat SD	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	

## SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Esselonisasi

Tingkat Esselonisasi	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Eselon II b	-	1	1	
Eselon III a	1	-	1	
Eselon III b	1	2	3	
Eselon IV a	1	1	2	
Pejabat Fungsional	4	5	9	
Staf	8	8	16	
Pegawai Tidak Tetap	13	12	25	
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	

## SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural

Diklat Struktural	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Diklat Lemhanas	0	0	0	
Diklat PIM I	-	-	-	
Diklat PIM II	1	-	1	
Diklat PIM III	1	2	3	
Diklat PIM IV	2	1	3	
Diklat Prajabatan	12	13	25	
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	



<b>II URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>II.1 URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL</b>																			
<b>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>																			
<b>Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial</b>																			
					2%	2%	3%	5%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Persentase PMKS yang terselesaikan permasalahan kesejahteraan sosial</b>																		
	Persentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103,1%	99%	100%	100%	100%	103,1%	99%	100%
	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif				40%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	250%	200%	167%	143%	125%
	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya				10%	20%	35%	40%	45%	103%	106%	73%	65%	75%	1030%	530%	209%	163%	167%
	Persentase Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Boalemo				20.86%	20.61%	20.36%	20.11%	19.86%	20.33%	18.87%	18.57%	18.57%	18.57%	97%	92%	91%	92%	94%
<b>III URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>III.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P3A</b>																			
	Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat				60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	167%	154%	143%	133%	125%



III.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
Mengembangkan Perekonomian Perdesaan																				
Berkembangnya Ekonomi Desa																				
Persentase desa yang maju (mandiri)					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Terbentuk dan Aktif Menjalankan Usaha					55 BUMDes	60 BUMDes	65 BUMDes	70 BUMDes	82 BUMDes	82 BUMDes	82 BUMDes	82 BUMDes	82 BUMDes	82 BUMDes	149,09%	136,67%	126,15%	117,14%	100%	
Jumlah Desa yang difasilitasi Pendirian BUMDes dan menyertakan Modal dari Dana Desa					55 Desa	60 Desa	65 Desa	70 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	149,09%	136,67%	126,15%	117,14%	100%	
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif					90%	90%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	111%	111%	105%	105%	105%	
Persentase Aparatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa					60%	65%	70%	75%	80%	0%	0%	0%	1,32%	80%	0%	0%	0%	2%	100%	

**Tabel T-C. 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**  
**Kabupaten Boalemo**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>																	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo																	
Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	456,760,000	476,220,000	502,120,000	523,980,000	549,430,000	1,297,201,201	849,181,059	1,055,795,314	860,849,669	728,239,947	284.00%	178.32%	210.27%	164.29%	132.54%	501,702,000.00	4,208,675,232.40
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	256,760,000	276,220,000	252,120,000	273,980,000	299,430,000	1,297,201,201	849,181,059	696,564,014	641,462,062	520,381,947	505.22%	307.43%	276.28%	234.13%	173.79%	271,702,000.00	3,588,484,725.40
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	359,231,300	219,387,607	207,858,000	0.00%	0.00%	143.69%	87.76%	83.14%	230,000,000.00	620,190,507.00
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL</b>																	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat																	
Terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial																	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	3,747,670,000	3,773,720,000	3,799,720,000	3,825,130,000	3,851,750,000	675,275,900	1,116,720,000	674,421,500	419,076,000	173,252,820	18.02%	29.59%	17.75%	10.96%	4.50%	3,799,598,000.00	2,920,143,964.00
Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	-	112,755,000	-	-	-	0.00%	9.40%	0.00%	0.00%	0.00%	1,200,000,000.00	112,755,000.00
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	1,279,554,000	1,305,604,000	1,331,604,000	1,357,014,000	1,383,634,000	452,450,000	873,320,000	674,421,500	387,235,000	145,460,000	35.36%	66.89%	50.65%	28.54%	10.51%	1,331,482,000.00	2,416,518,500.00
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1,268,116,000	1,268,116,000	1,268,116,000	1,268,116,000	1,268,116,000	222,825,900	130,645,000	-	31,841,000	27,792,820	17.57%	10.30%	0.00%	2.51%	2.19%	1,268,116,000.00	390,870,464.00

<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>373,400,000</b>	<b>398,670,000</b>	<b>425,670,000</b>	<b>450,750,000</b>	<b>476,980,000</b>	<b>449,455,343</b>	<b>381,711,000</b>	<b>108,000,000</b>	<b>126,000,000</b>	<b>134,256,745</b>	<b>120.37%</b>	<b>95.75%</b>	<b>25.37%</b>	<b>27.95%</b>	<b>28.15%</b>	<b>425,094,000.00</b>	<b>1,092,017,692.00</b>
Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	180,000,000	200,000,000	225,000,000	225,000,000	250,000,000	-	124,826,000	-	-	-	0.00%	62.41%	0.00%	0.00%	0.00%	216,000,000.00	124,826,000.00
Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	193,400,000	198,670,000	200,670,000	225,750,000	226,980,000	449,455,343	256,885,000	108,000,000	126,000,000	134,256,745	232.40%	129.30%	53.82%	55.81%	59.15%	209,094,000.00	967,191,692.00
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>292,990,000</b>	<b>325,230,000</b>	<b>351,530,000</b>	<b>376,560,000</b>	<b>407,560,000</b>	<b>425,793,942</b>	<b>1,061,671,437</b>	<b>4,499,525,650</b>	<b>672,853,059</b>	<b>589,283,845</b>	<b>145.33%</b>	<b>326.44%</b>	<b>1279.98%</b>	<b>178.68%</b>	<b>144.59%</b>	<b>350,774,000.00</b>	<b>6,777,700,857.00</b>
Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	185,398,000	-	-	70,842,175	0.00%	185.40%	0.00%	0.00%	70.84%	100,000,000.00	199,566,435.00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	45,668,982	652,584,737	161,395,000	651,745,059	463,892,420	45.67%	652.58%	161.40%	651.75%	463.89%	100,000,000.00	1,604,172,262.00
Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggapan Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	92,990,000	125,230,000	151,530,000	176,560,000	207,560,000	380,124,960	223,688,700	4,338,130,650	21,108,000	54,549,250	408.78%	178.62%	2862.89%	11.96%	26.28%	150,774,000.00	4,973,962,160.00
<b>Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS</b>	<b>467,980,000</b>	<b>498,120,000</b>	<b>521,420,000</b>	<b>598,120,000</b>	<b>573,120,000</b>	<b>-</b>	<b>18,995,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.81%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>531,752,000.00</b>	<b>18,995,000.00</b>
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	467,980,000	498,120,000	521,420,000	598,120,000	573,120,000	-	18,995,000	-	-	-	0.00%	3.81%	0.00%	0.00%	0.00%	531,752,000.00	18,995,000.00
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P3A</b>																	
<b>Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>423,600,000</b>	<b>451,650,000</b>	<b>426,890,000</b>	<b>452,210,000</b>	<b>477,980,000</b>	<b>423,600,000</b>	<b>523,259,500</b>	<b>131,772,200</b>	<b>214,064,500</b>	<b>64,849,350</b>	<b>100.00%</b>	<b>115.86%</b>	<b>30.87%</b>	<b>47.34%</b>	<b>13.57%</b>	<b>446,466,000.00</b>	<b>1,305,666,070.00</b>
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	423,600,000	451,650,000	426,890,000	452,210,000	477,980,000	423,600,000	523,259,500	131,772,200	214,064,500	64,849,350	100.00%	115.86%	30.87%	47.34%	13.57%	446,466,000.00	1,305,666,070.00
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																	
<b>Mengembangkan perekonomian perdesaan</b>																	
<b>Berkembangnya ekonomi desa</b>																	
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>476,360,000</b>	<b>502,960,000</b>	<b>529,550,000</b>	<b>555,220,000</b>	<b>581,270,000</b>	<b>362,939,169</b>	<b>236,786,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.19%</b>	<b>47.08%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>529,072,000.00</b>	<b>599,725,569.00</b>
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	276,360,000	252,960,000	279,550,000	305,220,000	331,270,000	334,728,669	191,988,400	-	-	-	121.12%	75.90%	0.00%	0.00%	0.00%	289,072,000.00	526,717,069.00
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	200,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	28,210,500	44,798,000	-	-	-	14.11%	17.92%	0.00%	0.00%	0.00%	240,000,000.00	73,008,500.00

<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>168,110,000</b>	<b>197,100,000</b>	<b>202,600,000</b>	<b>257,600,000</b>	<b>282,900,000</b>	<b>84,759,400</b>	<b>55,362,500</b>	-	-	<b>27,278,000</b>	<b>50.42%</b>	<b>28.09%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>9.64%</b>	<b>221,662,000.00</b>	<b>145,577,500.00</b>
Kegiatan Fasilitas Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	118,110,000	147,100,000	152,600,000	207,600,000	232,900,000	-	-	-	-	27,278,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.71%	171,662,000.00	5,455,600.00
Kegiatan Identifikasi dan Perlombaan Teknologi Tepat Guna	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	84,759,400	55,362,500	-	-	-	169.52%	110.73%	0.00%	0.00%	0.00%	50,000,000.00	140,121,900.00
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>203,300,000</b>	<b>229,390,000</b>	<b>235,780,000</b>	<b>261,120,000</b>	<b>286,150,000</b>	<b>738,213,800</b>	<b>599,801,206</b>	<b>70,635,000</b>	<b>97,910,000</b>	<b>353,717,820</b>	<b>363.12%</b>	<b>261.48%</b>	<b>29.96%</b>	<b>37.50%</b>	<b>123.61%</b>	<b>243,148,000.00</b>	<b>1,577,303,570.00</b>
Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	61,530,000	69,131,866	-	-	200,000,000	123.06%	138.26%	0.00%	0.00%	400.00%	50,000,000.00	170,661,866.00
Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	53,300,000	79,390,000	85,780,000	111,120,000	136,150,000	548,306,800	411,854,340	70,385,000	97,910,000	153,717,820	1028.72%	518.77%	82.05%	88.11%	112.90%	93,148,000.00	1,159,199,704.00
Kegiatan Perlombaan Desa	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	118,815,000	-	-	-	0.00%	237.63%	0.00%	0.00%	0.00%	50,000,000.00	118,815,000.00
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	128,377,000	-	250,000	-	-	256.75%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	50,000,000.00	128,627,000.00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>539,800,000</b>	<b>567,900,000</b>	<b>594,650,000</b>	<b>617,000,000</b>	<b>642,100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>740,000</b>	<b>532,621,025</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.12%</b>	<b>82.95%</b>	<b>592,290,000.00</b>	<b>107,264,205.00</b>
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	215,920,000	227,160,000	237,860,000	246,800,000	256,840,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	236,916,000.00	-
Kegiatan Penunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	123,074,000	129,481,000	135,580,000	140,676,000	146,398,000	-	-	-	-	500,780,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	342.07%	135,041,800.00	100,156,000.00
Kegiatan Pelatihan Aparat Desa/BPBD	200,806,000	211,259,000	221,210,000	229,524,000	238,862,000	-	-	-	740,000	31,841,025	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%	13.33%	220,332,200.00	7,108,205.00

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2017

NO	Lokasi Pelayanan Bencana	Jenis Bencana			
		Alam		Sosial	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kecamatan Tilamuta	2130	6389	0	1
2	Kecamatan Paguyaman	1347	4040	5	14
3	Kecamatan Wonosari	843	2529	2	5
4	Kecamatan Paguyaman Pantai	73	220	0	0
5	Kecamatan Dulupi	893	2680	1	4
6	Kecamatan Botumoito	266	799	9	28
7	Kecamatan Mananggu	7	20	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>5559</b>	<b>16677</b>	<b>17</b>	<b>52</b>

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2018

NO	Lokasi Pelayanan Bencana	Jenis Bencana			
		Alam		Sosial	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kecamatan Tilamuta	2290	6870	2	5
2	Kecamatan Paguyaman	1017	3050	0	0
3	Kecamatan Wonosari	207	622	0	0
4	Kecamatan Paguyaman Pantai	24	72	1	3
5	Kecamatan Dulupi	589	1766	0	0
6	Kecamatan Botumoito	232	696	1	4
7	Kecamatan Mananggu	18	54	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>4377</b>	<b>13130</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2019

NO	Lokasi Pelayanan Bencana	Jenis Bencana			
		Alam		Sosial	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kecamatan Tilamuta	80	241	9	27
2	Kecamatan Paguyaman	81	243	8	25
3	Kecamatan Wonosari	81	244	5	14
4	Kecamatan Paguyaman Pantai	82	245	7	20
5	Kecamatan Dulupi	81	242	6	18
6	Kecamatan Botumoito	80	240	17	51
7	Kecamatan Mananggu	80	239	8	24
<b>Jumlah</b>		<b>565</b>	<b>1694</b>	<b>60</b>	<b>179</b>

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2020

NO	Lokasi Pelayanan Bencana	Jenis Bencana			
		Alam		Sosial	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kecamatan Tilamuta	3481	10442	505	1516
2	Kecamatan Paguyaman	1870	5610	693	2079
3	Kecamatan Wonosari	2433	7300	542	1627
4	Kecamatan Paguyaman Pantai	233	700	96	288
5	Kecamatan Dulupi	2833	8500	312	937
6	Kecamatan Botumoito	710	2130	291	873
7	Kecamatan Mananggu	46	139	266	797
<b>Jumlah</b>		<b>11607</b>	<b>34821</b>	<b>2706</b>	<b>8117</b>

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2021

NO	Lokasi Pelayanan Bencana	Jenis Bencana			
		Alam		Sosial	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kecamatan Tilamuta	820	2459	14	42
2	Kecamatan Paguyaman	285	856	3	9
3	Kecamatan Wonosari	88	265	1	3
4	Kecamatan Paguyaman Pantai	73	220	3	9
5	Kecamatan Dulupi	205	614	4	12
6	Kecamatan Botumoito	48	143	3	9
7	Kecamatan Mananggu	21	63	3	9
<b>Jumlah</b>		<b>1540</b>	<b>4620</b>	<b>31</b>	<b>93</b>

**Jumlah Aset dan Peralatan**  
**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**terdiri dari :**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KONDISI</b>	<b>KETERANGAN</b>
I	Kendaraan Operasional Roda Dua	21 Unit	10 Layak Pakai	2 Rusak Berat
II	Peralatan Operasional Kantor			
1	Mesin Ketik Manual	2 Unit		Rusak Berat
2	Mesin Ketik Elektronik	1 Unit		Rusak Berat
3	Laptop	23 Unit	18 Layak Pakai	5 Rusak Berat
4	Komputer PC	4 Unit	1 Layak Pakai	3 Rusak Berat
5	Mesin Listrik Standar	2 Unit		Rusak Berat
6	Mesin Absen	1 Unit		Rusak Berat
7	Komputer Server	4 Unit	Baik	
8	UPS	2 Unit	Baik	
9	Audio Phone In	2 Unit		Rusak Berat
10	Video Tape Recorder	1 Unit		Rusak Berat
11	Hardisk	1 Unit	Baik	
12	Printer	23 Unit	7 Layak Pakai	6 Rusak Berat, 10 Rusak Ringan
13	Meja Kerja	5 Unit		Rusak Berat
14	Photo Tustel	1 Unit		Rusak Berat
15	Camera Film	3 Unit		Rusak Berat
16	Meja Biro	1 Unit		Rusak Berat
17	Kursi Kerja	3 Unit	2 Layak Pakai	1 Rusak Berat
18	Meja Rapat	1 Set	Baik	
19	Lemari Kayu	6 Unit	Baik	
20	Lemari Arsip Pejabat	1 Unit	Baik	
21	Kursi Tamu	2 Unit	Baik	
22	Lemari Arsip Dinamis	1 Unit	Baik	
23	Tempat Tidur Kayu	1 Unit		Bantuan Masyarakat



24	Kursi Rapat	2 Set	Baik	
25	Televisi	5 Unit	Baik	
26	Handycam	1 Unit		Rusak Berat
27	Tabung Gas	1 Unit	Baik	
28	Kompor Gas	1 Unit	Baik	
29	Alat Dapur Lain	1 Set	Baik	
30	AC Split	4 Unit	1 Layak Pakai	3 Rusak Berat
31	AC Unit	1 Unit		Rusak Berat
32	Sound System	9 Set	4 Layak Pakai	5 Rusak Berat
33	Radio	1 Unit		Rusak Berat
34	Dispenser	1 Unit		Rusak Berat
35	Peralatan Personal Komputer Lain	1 Set		Rusak Berat
36	Alat Kantor Lainnya	1 Set		Rusak Berat
37	Alat Rumah Tangga Lain	1 Set		Bantuan Masyarakat
38	Tenda	1 Unit		Bantuan Masyarakat
39	LCD Proyektor	1 Unit	Baik	
40	Lemari Es	1 Unit	Baik	
41	Kipas Angin	3 Unit	Baik	
42	Stabilisator	1 Unit	Baik	
43	Stavol	2 Unit	Baik	

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD (Faktor External)**

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan**

1. Masih banyaknya sarana dan prasarana Sosial, Penanggulangan Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang perlu ditingkatkan.
2. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena kurangnya sumber daya yang memadai sesuai disiplin ilmu

### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan**

1. Adanya dukungan Pemerintah dan Masyarakat terhadap program Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Adanya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Adanya Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Petugas Teknis Kesejahteraan Sosial dalam hal pelaksanaan program di Tingkat Kecamatan dan Desa
4. Adanya Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Petugas Teknis Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kecamatan dan Desa se Kabupaten Boalemo
5. Adanya Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Tim Verifikasi Program Tingkat Kecamatan dan Aparatur Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa

## **2.5 Kekuatan dan Kelemahan Pelayanan Kantor (Faktor Internal)**

### **2.5.1 Kekuatan Pengembangan Pelayanan**

1. Adanya Indikator Urusan Sosial yang menjadi Urusan Pelayanan Dasar (SPM)
2. Pelimpahan Kewenangan secara teknis Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Adanya Kemitraan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa
4. Komitmen Pemerintah baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam Menyelenggarakan Urusan Sosial dan Urusan PMD

### **2.5.2 Kelemahan Pengembangan Pelayanan**

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih sangat terbatas
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
3. Dukungan Alokasi Anggaran yang masih sangat terbatas

4. Keterlambatan Penyusunan Regulasi Tekhnis sebagai dampak perubahan Kebijakan baik ditingkat Pusat maupun daerah

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sumber daya manusia dan aparat yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sekaligus menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan pencapaian kinerja dinas, namun hal ini perlu di dukung dengan ketersediaan baik kualitas maupun kuantitas SDM yang saat ini masih sangat terbatas.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada saat ini di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga merupakan salah satu penunjang yang cukup menentukan dalam upaya pencapaian pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang saat ini sangat terbatas, hal ini sangat mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara optimal.

#### **3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah**

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo maka pada pelaksanaannya pelayanan dalam masa transisi pemerintahan ini akan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Adapun arah tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 di, adalah sebagai berikut :

##### **1. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**

Perekonomian Daerah di Kabupaten Boalemo sebagian besar bertumpu pada kegiatan Agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pengelolaan sumberdaya agribisnis yang diharapkan mampu mewujudkan peningkatan perekonomian boalemo yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi di bidang agribisnis diharapkan PDRB dibidang agribisnis meningkat.

Selain sektor agribisnis, peningkatan ekonomi bersumber dari potensi sumberdaya alam lainnya yaitu dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif, yang diharapkan mampu berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian. Pembangunan perekonomian harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang relevan.

Tujuan dari meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- a. Meningkatnya agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah;
- b. Meningkatnya Status Desa dan Pemerataan Wilayah;
- c. Meningkatnya pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dan pelayanan dasar serta konektivitas Boalemo dengan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah Teluk Tomini.

## **2. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas**

Lingkungan Hidup yang berkualitas dapat dicapai dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini pun harus didukung dengan ketahanan dan manajemen resiko bencana yang memadai agar mampu mendukung pembangunan di kabupaten Boalemo.

Tujuan dari Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- a. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. Meningkatnya mitigasi dan ketahanan bencana.

## **3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kemandirian suatu daerah dapat diukur dari sumber daya manusianya. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin tinggi indeks pembangunan manusia di daerah tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, kesenjangan sosial, dan perlindungan dasar masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu bersaing di era ekonomi global dan beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 yang nantinya mampu mewujudkan Boalemo dari daerah pertanian menuju daerah industri. Dengan kemajuan teknologi yang ada, perhatian terhadap adat istiadat, budaya, dan nilai religius masyarakat diharapkan tidak memudar. Kecintaan terhadap eksotika Boalemo yang menjadi jati diri serta kebanggaan daerah diharapkan menjadi role model pembangunan peradaban.

Tujuan dari Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan literasi masyarakat;
- b. Meningkatnya akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat;
- c. Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengentasan permasalahan sosial;
- d. Meningkatnya kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, adat, seni, dan budaya.

#### **4. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Optimal**

Pemerintah daerah sejatinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang mampu mengayomi masyarakat secara utuh dan menyeluruh merupakan tujuan utama pelayanan publik. Kelembagaan yang didukung oleh sistem pemerintahan yang baik mampu memberikan pelayanan yang prima, menjaga keamanan dan ketertiban, serta perbaikan tata kelola kelembagaan. Pemerintah bersama dengan rakyat diharapkan mampu bersinergi agar dapat mewujudkan boalemo menjadi role model tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, pelayanan yang prima mampu mendapat kepercayaan rakyat sehingga menjadikan Boalemo yang amanah.

Tujuan dari meningkatkan Akses dan Layanan Pemerintahan Daerah dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- a. Meningkatnya Kualitas tata kelola pelayanan publik; dan
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi, keamanan dan ketertiban daerah.

Sebagaimana penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dimaksud dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.2

*Keterkaitan Tujuan dan Sasaran*

Tujuan	Sasaran
Peningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Status Desa dan Pemerataan Wilayah
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Meningkatnya mitigasi dan ketahanan bencana
Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengentasan permasalahan sosial
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Optimal	Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan publik

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

#### a. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024, yaitu: ***Kementerian Sosial yang andal Profesional dan Inovatif serta Berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Nilai dan Semangat Gotong Royong”*** dengan misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan) dan 9

(sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut :

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
4. misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6 dan 7.

### **Tujuan Strategis Kementerian Sosial**

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya Visi Pembangunan Nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

### **Sasaran Strategis Kementerian Sosial**

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, sasaran strategis tersebut adalah :



1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, melalui indikator :
  - Indeks Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, melalui indikator :
  - Indeks Partisipasi Sosial;
  - Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan Non ASN)
  - Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
  - Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui indikator :

Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

**b. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dapat mencapai Visi Pembangunan Indonesia adalah : ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*** dengan misi terdiri atas:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selain Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 5 (lima) arahan Presiden dalam mewujudkan sasaran Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan kedua undang-undang Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu kepada Misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah : ***“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 akan dapat dicapai melalui misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan penatakelolaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
4. Menyeraskan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
6. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik dan bersih

### **Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024**

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan
5. Terentaskannya daerah tertinggal
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul, dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

### **Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024**

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya status pembangunan desa, melalui indikator :
  - Jumlah desa mandiri
  - Jumlah desa berkembang
  - Jumlah desa tertinggal
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), melalui indikator :

- Nilai rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
- 3. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian, melalui indikator :
  - Nilai rata-rata indeks perkembangan N/A Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
- 4. Menurunnya angka kemiskinan, melalui indikator :
  - Persentase penurunan angka kemiskinan
- 5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melalui indikator :
  - Jumlah Bumdes berkembang
  - Jumlah Bumdes maju
- 6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), melalui indikator:
  - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang
  - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju
- 7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi, melalui indikator :
  - Persentase kenaikan investasi produk unggulan perdesaan
- 8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan, melalui indikator :
  - Penyerapan tenaga kerja perdesaan
- 9. Terentaskannya daerah tertinggal, melalui indikator :
  - Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
- 10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal, melalui indikator :
  - Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
- 11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal, melalui indikator :
  - Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
- 12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi, melalui indikator :
  - Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
- 13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi, melalui indikator :

- Nilai rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi
- 14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan, melalui indikator :
  - Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
  - Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
- 15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan *governance*, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan, melalui indikator :
  - Nilai Reformasi Birokrasi
- 16. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian, melalui indikator :
  - Nilai Laporan Pengelolaan Keuangan
- 17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi, melalui indikator :
  - Persentase dokumen pengembangan kebijakan, perencanaan data dan informasi yang diimplementasikan.

#### **c. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo**

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui Pemberdayaan dan Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka menuju Ketahanan Sosial Masyarakat yang Mandiri dan Inovatif.

- Misi :
1. Mendorong dan Mendukung Perluasan Penigkatan Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat.
  2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Sumber Pelayanan Masyarakat.
  3. Penguatan Kesetiakawanan Sosial, Kegotongroyongan dan Tanggungjawab/Kepedulian Sosial.
  4. Mengembangkan Potensi dan Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial serta Peningkatan Profesionalisasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

#### **d. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera

- Misi III : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan Adil. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang bias terlihat dari Peningkatan PDRB Perkapita dan Pengeluaran Perkapita, Pemerataan Pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan
- Tujuan 1 : Meningkatkan Status Perkembangan Desa/Kelurahan
- Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Masyarakat.
- Sasaran 1.2 : Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat yang berkualitas
- Tujuan 2 : Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Sasaran 2.1 : Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rencana Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna di Provinsi
- Misi IV : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan Kualitas Intak, Pendidikan, Kesehatan dan Pengembangan Budaya Daerah agar tercipta Sumber Daya Manusia Gorontalo yang Berkualitas dan Religius serta Penurunan Angka Kemiskinan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar.
- Tujuan 1 : Meningkatkan Status Perkembangan Desa/Kelurahan
- Sasaran 1.1 : Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat yang Berkualitas
- Misi V : Terciptanya Pemerintahan yang lebih baik dan lebih melayani. Menciptakan Aparatur Pemerintah yang Kreatif, Inovatif, Kompetitif dan Profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah
- Tujuan 1 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- Sasaran 1.1 : Meningkatannya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Berbasis Reformasi Birokrasi

### **3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pengembangan Wilayah di Kabupaten Boalemo berdasarkan pada Peraturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031. Melihat kondisi wilayah Kabupaten Boalemo, maka potensi pengembangan wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Potensi Pengembangan Hutan Produksi;

- b. Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian;
- c. Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan;
- d. Potensi Pengembangan Kawasan Peternakan;
- e. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan;
- f. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan;
- g. Potensi Pengembangan Kawasan Industri;
- h. Potensi Pengembangan Kawasan Perdagangan;
- i. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- j. Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- k. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan; dan
- l. Potensi Pengembangan Pertambangan.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Rumusan isu-isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo didasarkan atas telaahan terhadap pencapaian Renstra periode sebelumnya, sehingga diperoleh sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan keluarga miskin dengan meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
2. Pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan pada pengembangan kemandirian melalui peningkatan keterampilan dan penguatan akses bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS) dalam memanfaatkan sistim sumber;
3. Masih rendahnya pengetahuan aparat terkait administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan;
4. Adanya peningkatan permasalahan - permasalahan sosial sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 terutama masalah kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan dan masalah bencana sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan pelaku dunia usaha;
5. Kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat miskin dalam berusaha sehingga sulit untuk memperbaiki ekonomi keluarganya;
6. Penduduk Usia Lanjut terus meningkat dikarenakan oleh tingginya Usia Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak yang bisa diakomodir oleh pemerintah dalam penanganannya;
7. Memantapkan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di Desa;
8. Memantapkan profil Desa sebagai basis data pelaksanaan pembangunan;

9. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam mengembangkan gotong royong;
10. Mendorong dan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam;
11. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur pada Dinas Sosial dan PMD yang masih sangat terbatas.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam rangka mencapai Misi yang dikemukakan di atas serta dengan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan organisasi, maka tujuan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan pelayanan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial
4. Mengembangkan dan memulihkan perekonomian masyarakat perdesaan

Adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik
2. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
3. Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial
4. Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa
5. Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan

**Tabel T-C. 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Pengukuran	Satuan	Kinerja Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke -			
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Nilai SAKIP Kabupaten			Hasil Evaluasi SAKIP	Predikat	B	B	B	BB	A
			Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi SAKIP	Predikat	B	B	BB	BB	A
				Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti total temuan OPD tahun berjalan X 100%	Persen	100	100	100	100	100

				Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan OPD	$\frac{\text{Jumlah BMD dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Total BMD}} \times 100\%$	Persen	80	80	80	80	80
				Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis}}{\text{total jumlah ASN}} \times 100\%$	Persen	25	30	45	50	60
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti}}{\text{Populasi penyandang disabiitas terlantar, anak terlantar,}}$	Persen	100	100	100	100	100

					lanjut usia terlantar dan gelandangan X 100%						
			Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang terselesaikan permasalahan kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang terselesaikan permasalahan kesejahteraan sosial <hr/> Jumlah PMKS yang seharusnya terselesaikan permasalahan kesejahteraan sosial X 100%	Persen	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan perlindungan dan jaminan pelayanan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			Jumlah korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran <hr/> Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100

					pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten X 100%						
			Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat makanan dan sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat makanan dan sandang sesuai target	Orang	4682	4682	4682	4682	4682
5	Mengembangkan dan Memulihkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan	Persentase pengentasan status desa tertinggal			Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun <hr/> Jumlah desa tertinggal X 100%	Persen	N/A	40	60	80	100

		Persentase peningkatan status desa mandiri			<p>Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun</p> <hr/> <p>Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) X 100%</p>	Persen	2,60	3,90	5,19	6,49	7,79
			Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi terkait Penataan Desa dan Administrasi Desa	<p>Jumlah desa yang terfasilitasi terkait penataan desa dan administrasi desa</p> <hr/> <p>Total jumlah desa yang terfasilitasi terkait penataan desa dan administrasi desa X 100%</p>	Persen	100	100	100	100	100

			Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa <hr/> Jumlah Desa yang seharusnya terfasilitasi dalam kerja sama antar desa X 100%	Persen	100	100	100	100	100
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan sesuai target	Lembaga	738	738	738	738	738

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

##### 1. Perumusan Strategi

Mempertimbangkan berbagai kemungkinan kondisi dan permasalahan yang ada serta mengacu pada isu-isu strategis, tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka ada 8 (delapan) strategi inti yang di tekankan pada rentang pencapaian 4 (empat) tahun. Adapun strategi tersebut sebagai berikut :

- a. Strategi Pemberdayaan Sosial
- b. Strategi Kemitraan Sosial
- c. Strategi Pendampingan Sosial
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial
- e. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik
- f. Peningkatan kapasitas masyarakat
- g. Pemenuhan sarana dan prasarana
- h. Perbaikan sistem dan kelembagaan di desa

#### 5.2 Kebijakan

##### 1. Perumusan Kebijakan

Kebijakan pembangunan Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan pada penurunan populasi penyandang masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memprioritaskan pada upaya sebagai berikut :

- a. Memperkuat dan mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi sumber daya alam, sumber daya tenaga, sumber daya lokal sebagai basis pengembangan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan sosial dan bantuan sosial dengan mengacu pada kebutuhan dasar masyarakat, kelayakan serta bermanfaat.
- c. Pemberdayaan potensi pada individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan dan bantuan sosial.
- d. Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan dari tingkat Pusat, Provinsi Kabupaten, Kecamatan hingga Desa
- e. Pemantapan dan pembinaan kemitraan sosial di masyarakat



- f. Peningkatan manajemen sistim perlindungan dan pelayanan sosial yang berdasar pada pengakuan atas hak-hak dasar warga individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mampu.
- g. Membentuk dan melakukan pembinaan kepada lembaga sosial serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
- h. Peningkatan sistem pelayanan dan potensi sumber daya
- i. Meningkatkan system pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah
- j. Meningkatkan peran Penyelenggara Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten
- k. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Potensi Desa

**TABEL TC-26**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

TUJUAN RPD	: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
SASARAN RPD	: Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengentasan permasalahan sosial		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat	Terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial	<p>1.1 Strategi Pemberdayaan Sosial</p> <p>2.1 Strategi Kemitraan Sosial</p>	<p>1.1 Memperkuat dan mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi sumber daya alam, sumber daya tenaga, sumber daya lokal sebagai basis pengembangan kesejahteraan sosial</p> <p>1.2 Meningkatkan kinerja pelayanan sosial dan bantuan sosial dengan mengacu pada kebutuhan dasar masyarakat, kelayakan serta bermanfaat</p> <p>1.3 Pemberdayaan potensi pada individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan dan bantuan sosial</p> <p>2.1 Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan dari tingkat Pusat, Provinsi Kabupaten, Kecamatan hingga Desa</p> <p>2.2 Pemantapan dan pembinaan kemitraan</p>

		3.1 Strategi Pendampingan Sosial	<p>sosial di masyarakat</p> <p>3.1 Peningkatan manajemen sistim perlindungan dan pelayanan sosial yang berdasar pada pengakuan atas hak-hak dasar warga individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mampu</p> <p>3.2 Membentuk dan melakukan pembinaan kepada lembaga sosial serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan</p>
<b>TUJUAN RPD</b>	<b>: Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas</b>		
<b>SASARAN RPD</b>	<b>: Meningkatnya mitigasi dan ketahanan bencana</b>		
Meningkatkan perlindungan dan jaminan pelayanan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	1.1 Menyiapkan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial	1.1 Peningkatan sistem pelayanan dan potensi sumber daya
<b>TUJUAN RPD</b>	<b>: Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Optimal</b>		
<b>SASARAN RPD</b>	<b>: Meningkatnya Kualitas tata kelola pelayanan publik</b>		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik	1.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik	1.1 Meningkatkan sistem pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah
<b>TUJUAN RPD</b>	<b>: Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat</b>		
<b>SASARAN RPD</b>	<b>: Meningkatnya Status Desa dan Pemerataan Wilayah</b>		
Mengembangkan dan memulihkan perekonomian Masyarakat perdesaan	1. Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa	<p>1.1 Peningkatan kapasitas masyarakat</p> <p>1.2 Pemenuhan sarana dan prasarana</p> <p>1.3 Perbaikan sistem dan kelembagaan di desa</p>	1.1 Meningkatkan peran Penyelenggara Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten

	2. Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan		1.2 Mengembangkan dan Mengoptimalkan Potensi Desa.
--	--	--	--

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin

Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, meliputi :

##### 1. Program Pemberdayaan Sosial. Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :

1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
  1. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
  2. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
2. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 6.2 Rencana Program dan Kegiatan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

##### 1. Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  1. Penyediaan Permakanan
  2. Penyediaan Sandang
  3. Penyediaan Alat Bantu
  4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

8. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
10. Pemberian Layanan Kedaruratan
11. Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga
12. Pemberian Layanan Rujukan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  2. Pemberian Layanan Kedaruratan
  3. Penyediaan Permakanan
  4. Penyediaan Sandang
  5. Penyediaan Alat Bantu
  6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
  7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
  9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
  10. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
  12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  13. Pemberian Layanan Rujukan
  14. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

**2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :**

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
  1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
  2. Rujukan Anak-Anak Terlantar
  3. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

### **3. Program Penanganan Bencana**

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  1. Penyediaan Makanan
  2. Penyediaan Sandang
  3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
  4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
  5. Pelayanan Dukungan Psikososial
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
  2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

### **6.3 Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal**

Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal meliputi :

#### **1. Program Penataan Desa, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :**

1. Penyelenggaraan Penataan Desa
  1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
  2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
  3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
  4. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
  5. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
  6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

#### **2. Program Peningkatan Kerjasama Desa, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :**

1. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
  1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
  2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
  3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### **3. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :**

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
9. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
12. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
13. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
14. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
15. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
16. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

**4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan dan Sub Keegiatannya terdiri dari :**

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
  1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  2. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
  4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
  5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa



6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

TABEL TC-27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOALEMO**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Pengukuran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik	1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Hasil Pelaksanaan kegiatan program penunjang administrasi perkantoran $\frac{\text{Target Pelaksanaan kegiatan program penunjang administrasi perkantoran}}{\text{Target Pelaksanaan kegiatan program penunjang administrasi perkantoran}} \times 100 \%$	100%	100%	3,776,057,100	100%	3,776,057,100	100%	3,776,057,100	100%	3,776,057,100	100%	15,104,228,400		
		1	06	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	Jumlah Dokumen yang telah diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	100%	100%	1,025,000	100%	1,025,000	100%	1,025,000	100%	1,025,000	100%	4,100,000		
			01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai target	11 Dokumen	8 Dokumen	375,000	11 Dokumen	375,000	8 Dokumen	375,000	8 Dokumen	375,000	35 Dokumen	1,500,000		
			01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai target	5 Dokumen	5 Dokumen	375,000	5 Dokumen	375,000	5 Dokumen	375,000	5 Dokumen	375,000	20 Dokumen	1,500,000		
			01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai target	4 Dokumen	4 Dokumen	275,000	4 Dokumen	275,000	4 Dokumen	275,000	4 Dokumen	275,000	16 Dokumen	1,100,000		

1	06	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen yang telah diselesaikan	100%	100%	3,434,385,010	100%	3,434,385,010	100%	3,434,385,010	100%	3,434,385,010	100%	13,737,540,040				
							$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan}} \times 100\%$															
			01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sesuai target	35 Orang	35 Orang	3,432,885,010	35 Orang	3,432,885,010	35 Orang	3,432,885,010	35 Orang	3,432,885,010	35 Orang	13,731,540,040			
			01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sesuai target	18 Laporan	18 Laporan	1,500,000	18 Laporan	1,500,000	18 Laporan	1,500,000	18 Laporan	1,500,000	72 Laporan	6,000,000			
1	06	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen yang telah diselesaikan	100%	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	750,000	100%	3,000,000				
							$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan}} \times 100\%$															
			01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai target	14 Laporan	14 Laporan	750,000	14 Laporan	750,000	14 Laporan	750,000	14 Laporan	750,000	56 Laporan	3,000,000			
1	06	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Administrasi Kepegawaian PD yang telah diselesaikan	100%	100%	27,250,000	100%	27,250,000	100%	27,250,000	100%	27,250,000	100%	27,250,000	100%	109,000,000		
							$\frac{\text{Jumlah Administrasi Kepegawaian PD yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Administrasi Kepegawaian PD yang harus diselesaikan}} \times 100\%$															
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sesuai target	1 Paket	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	4 Paket	80,000,000				
			01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sesuai target	5 Dokumen	5 Dokumen	1,250,000	6 Dokumen	1,250,000	6 Dokumen	1,250,000	7 Dokumen	1,250,000	25 Dokumen	5,000,000			
			01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai target	34 Orang	34 Orang	6,000,000	34 Orang	6,000,000	34 Orang	6,000,000	34 Orang	6,000,000	34 Orang	24,000,000			
1	06	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterseediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	$\frac{\text{Jumlah Perlengkapan Kantor}}{\text{Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan}} \times 100\%$	100%	100%	122,647,090	100%	122,647,090	100%	122,647,090	100%	122,647,090	100%	490,588,360			
			01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sesuai target	-	6 Paket	7,500,000	6 Paket	7,500,000	6 Paket	7,500,000	6 Paket	7,500,000	24 Paket	30,000,000			
			01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai target	20 Laporan	75 Laporan	115,147,090	120 Laporan	115,147,090	125 Laporan	115,147,090	125 Laporan	115,147,090	445 Laporan	460,588,360			

1	06	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di OPD	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di OPD $\frac{\text{Jumlah Kebutuhan}}{\text{Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di OPD}} \times 100 \%$	-	100%	141,500,000	100%	141,500,000	100%	141,500,000	100%	141,500,000	100%	566,000,000		
		01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan sesuai target	-	1 unit	125,000,000	2 unit	125,000,000	2 unit	125,000,000	2 unit	125,000,000	7 Unit	500,000,000		
		01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sesuai target	-	5 Paket	1,500,000	5 Paket	1,500,000	5 Paket	1,500,000	5 Paket	1,500,000	20 Paket	6,000,000		
		01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sesuai target	-	5 Unit	15,000,000	3 Unit	15,000,000	3 Unit	15,000,000	3 Unit	15,000,000	14 Unit	60,000,000		
1	06	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di OPD	$\frac{\text{Terseadinya Jasa Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan dalam setahun}}{\text{Jumlah Jasa Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan dalam setahun}} \times 100 \%$	-	100%	20,500,000	100%	20,500,000	100%	20,500,000	100%	20,500,000	100%	82,000,000		
		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai target	-	4 Laporan	500,000	4 Laporan	500,000	4 Laporan	500,000	4 Laporan	500,000	16 Laporan	2,000,000		
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sesuai target	-	3 Laporan	15,000,000	3 Laporan	15,000,000	3 Laporan	15,000,000	3 Laporan	15,000,000	12 Laporan	60,000,000		
		01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sesuai target	-	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	48 Laporan	20,000,000		
1	06	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan di OPD dalam kondisi baik	$\frac{\text{Kondisi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan di OPD dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan di OPD}} \times 100 \%$	100%	100%	28,000,000	100%	28,000,000	100%	28,000,000	100%	28,000,000	100%	112,000,000		
		01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sesuai target	10 Unit	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	40 Unit	10,000,000		
		01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sesuai target	10 Unit	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,500,000	40 Unit	10,000,000		
		01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara sesuai target	10 Buah	15 Buah	1,500,000	15 Buah	1,500,000	15 Buah	1,500,000	15 Buah	1,500,000	60 Buah	6,000,000		

			01	2.09	06	Pemeliharaan Perakatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Perakatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sesuai target	15 Unit	15 Unit	1,500,000	15 Unit	1,500,000	15 Unit	1,500,000	15 Unit	1,500,000	60 Unit	6,000,000				
			01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sesuai target	2 Buah	2 Buah	20,000,000	2 Buah	20,000,000	2 Buah	20,000,000	2 Buah	20,000,000	2 Buah	80,000,000				
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	1	06			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>																	
		1	06	02		<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>126,321,400</b>	<b>100%</b>	<b>127,374,700</b>	<b>100%</b>	<b>128,454,300</b>	<b>100%</b>	<b>129,560,900</b>	<b>100%</b>	<b>511,711,300</b>				
								$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya Mendapatkan Pemberdayaan}} \times 100\%$															
		1	06	02	2.01		<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Pemberdayaan KAT</b>	<b>Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	$\frac{\text{Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Keluarga pada KAT yang seharusnya Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>100,000,000</b>		
		1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai target	189 KK	189 KK	10,000,000	189 KK	10,000,000	189 KK	10,000,000	189 KK	10,000,000	189 KK	40,000,000			
		1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai target	3 Orang	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	3 Orang	60,000,000			
		1	06	02	2.02		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai target</b>	<b>2 Kali</b>	<b>10 Kali</b>	<b>1,321,400</b>	<b>10 Kali</b>	<b>2,374,700</b>	<b>10 Kali</b>	<b>3,454,300</b>	<b>10 Kali</b>	<b>4,560,900</b>	<b>40 Kali</b>	<b>11,711,300</b>			
		1	06	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai target	2 Dok.	10 Dok.	1,321,400	10 Dok.	2,374,700	10 Dok.	3,454,300	10 Dok.	4,560,900	40 Dok.	11,711,300			

1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai target	2 Kali	2 Kali	100,000,000	2 Kali	100,000,000	2 Kali	100,000,000	2 Kali	100,000,000	2 Kali	400,000,000			
1	06	02	2.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai target	2 Lembaga	2 Lembaga	100,000,000	2 Lembaga	100,000,000	2 Lembaga	100,000,000	2 Lembaga	100,000,000	2 Lembaga	400,000,000		
1	06	04			<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya Dasarnya</b>	<b>Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya Dasarnya</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>252,938,400</b>	<b>40%</b>	<b>255,047,450</b>	<b>60%</b>	<b>257,209,150</b>	<b>80%</b>	<b>259,424,950</b>	<b>100%</b>	<b>1,024,619,950</b>		
						$\frac{\text{Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya Dasarnya}}{\text{Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang seharusnya Terpenuhi Kebutuhannya Dasarnya}} \times 100\%$														
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya Dasarnya	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhannya Dasarnya sesuai target	86 Orang	17 Orang	164,938,400	34 Orang	167,047,450	51 Orang	169,209,150	68 Orang	171,424,950	86 Orang	672,619,950			
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal sesuai target	86 Orang	17 Orang	20,400,000	34 Orang	20,400,000	51 Orang	20,400,000	68 Orang	20,400,000	86 Orang	81,600,000		
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun sesuai target	86 Orang	17 Orang	13,038,400	34 Orang	15,147,450	51 Orang	17,309,150	68 Orang	19,524,950	86 Orang	65,019,950		
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai target	163 Orang	32 Orang	22,000,000	65 Orang	22,000,000	97 Orang	22,000,000	130 Orang	22,000,000	163 Orang	88,000,000		
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga sesuai target	86 Orang	17 Orang	20,000,000	34 Orang	20,000,000	51 Orang	20,000,000	68 Orang	20,000,000	86 Orang	80,000,000		
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial sesuai target	86 Orang	17 Orang	17,500,000	34 Orang	17,500,000	51 Orang	17,500,000	68 Orang	17,500,000	86 Orang	70,000,000		
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sesuai target	86 Orang	17 Orang	20,000,000	34 Orang	20,000,000	51 Orang	20,000,000	68 Orang	20,000,000	86 Orang	80,000,000		

1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas sesuai target	50 Orang	10 Orang	7,500,000	20 Orang	7,500,000	30 Orang	7,500,000	40 Orang	7,500,000	50 Orang	30,000,000		
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar sesuai target	20 Orang	4 Orang	5,000,000	8 Orang	5,000,000	12 Orang	5,000,000	16 Orang	5,000,000	20 Orang	20,000,000		
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan sesuai target	10 Orang	2 Orang	5,500,000	4 Orang	5,500,000	6 Orang	5,500,000	8 Orang	5,500,000	10 Orang	22,000,000		
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan sesuai target	5 Orang	1 Orang	14,000,000	2 Orang	14,000,000	3 Orang	14,000,000	4 Orang	14,000,000	5 Orang	56,000,000		
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga sesuai target	5 Orang	1 Orang	10,000,000	2 Orang	10,000,000	3 Orang	10,000,000	4 Orang	10,000,000	5 Orang	40,000,000		
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan sesuai target	10 Orang	2 Orang	10,000,000	4 Orang	10,000,000	6 Orang	10,000,000	8 Orang	10,000,000	10 Orang	40,000,000		
1	06	04	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial sesuai target</b>	<b>326 Orang</b>	<b>65 Orang</b>	<b>88,000,000</b>	<b>130 Orang</b>	<b>88,000,000</b>	<b>195 Orang</b>	<b>88,000,000</b>	<b>260 Orang</b>	<b>88,000,000</b>	<b>326 Orang</b>	<b>352,000,000</b>		
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan sesuai target	326 Orang	65 Orang	5,000,000	130 Orang	5,000,000	195 Orang	5,000,000	260 Orang	5,000,000	326 Orang	20,000,000		
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan sesuai target	5 Orang	1 Orang	5,000,000	2 Orang	5,000,000	3 Orang	5,000,000	4 Orang	5,000,000	5 Orang	20,000,000		
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal sesuai target	326 Orang	65 Orang	15,000,000	130 Orang	15,000,000	195 Orang	15,000,000	260 Orang	15,000,000	326 Orang	60,000,000		
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun sesuai target	326 Orang	65 Orang	10,000,000	130 Orang	10,000,000	195 Orang	10,000,000	260 Orang	10,000,000	326 Orang	40,000,000		
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan sesuai target	163 Orang	32 Orang	10,000,000	65 Orang	10,000,000	97 Orang	10,000,000	130 Orang	10,000,000	163 Orang	40,000,000		

1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti sesuai target	326 Orang	65 Orang	5,000,000	130 Orang	5,000,000	195 Orang	5,000,000	260 Orang	5,000,000	326 Orang	20,000,000		
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial sesuai target	326 Orang	65 Orang	10,000,000	130 Orang	10,000,000	195 Orang	10,000,000	260 Orang	10,000,000	326 Orang	40,000,000		
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA sesuai target	326 Orang	65 Orang	10,000,000	130 Orang	10,000,000	195 Orang	10,000,000	260 Orang	10,000,000	326 Orang	40,000,000		
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS sesuai target	5 Orang	1 Orang	3,000,000.00	2 Orang	3,000,000.00	3 Orang	3,000,000.00	4 Orang	3,000,000.00	5 Orang	12,000,000		
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar sesuai target	5 Orang	1 Orang	3,000,000	2 Orang	3,000,000	3 Orang	3,000,000	4 Orang	3,000,000	5 Orang	12,000,000		
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penebusan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penebusan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penebusan Keluarga sesuai target	5 Orang	1 Orang	3,000,000	2 Orang	3,000,000	3 Orang	3,000,000	4 Orang	3,000,000	5 Orang	12,000,000		
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga sesuai target	5 Orang	1 Orang	3,000,000	2 Orang	3,000,000	3 Orang	3,000,000	4 Orang	3,000,000	5 Orang	12,000,000		
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan sesuai target	5 Orang	1 Orang	3,000,000	2 Orang	3,000,000	3 Orang	3,000,000	4 Orang	3,000,000	5 Orang	12,000,000		
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota sesuai target	3 Orang	3 Orang	3,000,000	3 Orang	3,000,000	3 Orang	3,000,000	3 Orang	3,000,000	3 Orang	12,000,000		
1	06	05			<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b> <b>Jumlah PMKS yang X 100 % seharusnya mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>599,108,600</b>	<b>40%</b>	<b>604,104,000</b>	<b>60%</b>	<b>609,224,350</b>	<b>80%</b>	<b>614,472,650</b>	<b>100%</b>	<b>2,426,909,600</b>		
1	06	05	2.01		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Jumlah PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Jumlah PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai target</b>	<b>5 Orang</b>	<b>1 Orang</b>	<b>38,598,600</b>	<b>2 Orang</b>	<b>38,598,589</b>	<b>3 Orang</b>	<b>38,473,858</b>	<b>4 Orang</b>	<b>38,596,239</b>	<b>5 Orang</b>	<b>154,267,286</b>		



		1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau sesuai target	5 Orang	1 Orang	15,000,000	2 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	4 Orang	15,000,000	5 Orang	60,000,000		
		1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan sesuai target	5 Orang	1 Orang	15,000,000	2 Orang	15,000,000	3 Orang	15,000,000	4 Orang	15,000,000	5 Orang	60,000,000		
		1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara sesuai target	5 Orang	1 Orang	8,598,600	2 Orang	8,598,589	3 Orang	8,473,858	4 Orang	8,596,239	5 Orang	34,267,286		
		1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik	Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik sesuai target	9351 KK	9351 KK	560,510,000	9351 KK	565,505,411	9351 KK	570,750,492	9351 KK	575,876,411	9351 KK	2,272,642,314		
		1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata sesuai target	9351 KK	9351 KK	40,000,000	9351 KK	40,000,000	9351 KK	45,245,081	9351 KK	50,371,000	9351 KK	175,616,081		
		1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota sesuai target	9351 KK	9351 KK	93,510,000	9351 KK	98,505,411	9351 KK	98,505,411	9351 KK	98,505,411	9351 KK	389,026,233		
		1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sesuai target	9351 KK	9351 KK	402,000,000	9351 KK	402,000,000	9351 KK	402,000,000	9351 KK	402,000,000	9351 KK	1,608,000,000		
		1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat sesuai target	10 Orang	10 Orang	25,000,000	10 Orang	25,000,000	10 Orang	25,000,000	10 Orang	25,000,000	10 Orang	100,000,000		
Meningkatkan perlindungan dan jaminan pelayanan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	1	06	06			<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>	<b>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani kebutuhan dasarnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>212,558,700</b>	<b>100%</b>	<b>214,331,000</b>	<b>100%</b>	<b>216,147,650</b>	<b>100%</b>	<b>218,009,700</b>	<b>100%</b>	<b>861,047,050</b>		
		1	06	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>177,558,700</b>	<b>40%</b>	<b>179,331,000</b>	<b>60%</b>	<b>181,147,650</b>	<b>80%</b>	<b>183,009,700</b>	<b>100%</b>	<b>721,047,050</b>		
		1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) sesuai target	4682 Orang	4682 Orang	70,230,000	4682 Orang	70,230,000	4682 Orang	70,230,000	4682 Orang	70,230,000	4682 Orang	280,920,000		

		1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana sesuai target	4682 Orang	4682 Orang	50,000,000	4682 Orang	50,000,000	4682 Orang	50,000,000	4682 Orang	50,000,000	4682 Orang	200,000,000		
		1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian	Jumlah Tempat Pengungsian sesuai target	7 Kec.	1 Kec.	17,328,700	2 Kec.	19,101,000	3 Kec.	20,917,650	5 Kec.	22,779,700	7 Kec.	80,127,050		
		1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan sesuai target	50 Orang	50 Orang	15,000,000	50 Orang	15,000,000	50 Orang	15,000,000	50 Orang	15,000,000	50 Orang	60,000,000		
		1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial sesuai target	4682 Orang	4682 Orang	25,000,000	4682 Orang	25,000,000	4682 Orang	25,000,000	4682 Orang	25,000,000	4682 Orang	100,000,000		
		1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana sesuai target	7 Kali	7 Kali	35,000,000	7 Kali	35,000,000	7 Kali	35,000,000	7 Kali	35,000,000	7 Kali	140,000,000		
		1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana sesuai target	3 Kec.	3 Kec.	15,000,000	3 Kec.	15,000,000	3 Kec.	15,000,000	3 Kec.	15,000,000	3 Kec.	60,000,000		
		1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana sesuai target	135 Orang	135 Orang	20,000,000	135 Orang	20,000,000	135 Orang	20,000,000	135 Orang	20,000,000	135 Orang	80,000,000		
Mengembangkan dan Memulihkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan	Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa	2	13				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>															
	Meningkatnya Kerjasama dan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2	13	02			Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata secara Representatif	Jumlah Desa yang tertata secara representatif	100%	100%	181,555,600	100%	183,069,450	100%	184,621,100	100%	186,211,550	100%	705,457,700		
		2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik	Jumlah Desa yang tertata dengan baik sesuai target	-	2 Desa	181,555,600	3 Desa	183,069,450	5 Desa	184,621,100	6 Desa	186,211,550	16 Desa	705,457,700		
		2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa sesuai target	-	2 Desa	50,000,000	2 Desa	50,000,000	2 Desa	50,000,000	2 Desa	50,000,000	8 Desa	200,000,000		
		2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan Wilayahnya sesuai target	-	2 Desa	50,000,000	3 Desa	51,000,000	5 Desa	51,000,000	6 Desa	51,000,000	16 Desa	203,000,000		
		2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya sesuai target	-	3 Desa	25,000,000	5 Desa	25,000,000	6 Desa	25,000,000	8 Desa	26,588,431	22 Desa	101,588,431		

2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penamaan dan Kode Desa sesuai target	-	1 Desa	15,000,000	1 Desa	15,000,000	1 Desa	15,000,000	2 Desa	15,000,000	4 Desa	45,000,000		
2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Desa yang melakukan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa adat kewenangannya sesuai target	-	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	2 Laporan	15,000,000	3 Laporan	15,000,000	6 Laporan	45,000,000		
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan prasarana Desa sesuai target	-	2 Buah	26,555,600	5 Buah	27,069,450	4 Buah	28,621,100	4 Buah	28,623,119	15 Buah	110,869,269		
2	13	03			<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang melakukan Peningkatan Kerjasama Desa</b>	N/A	<b>2.4%</b>	<b>202,606,000</b>	<b>4.9%</b>	<b>204,295,350</b>	<b>7.3%</b>	<b>206,026,900</b>	<b>9.8%</b>	<b>207,801,750</b>	<b>9.8%</b>	<b>616,887,107</b>		
							<b>Jumlah Desa yang seharusnya melakukan Peningkatan Kerjasama Desa</b>													
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Kerja Sama Desa yang Terfasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Kerja sama Desa	-	2 Desa	202,606,000	2 Desa	204,295,350	2 Desa	206,026,900	2 Desa	207,801,750	8 Desa	616,887,107		
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar Desa dalam Kabupaten sesuai dengan target	-	1 Dokumen	32,606,000	3 Dokumen	33,606,011	3 Dokumen	33,606,011	2 Dokumen	33,606,011	9 Dokumen	133,424,033		
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten sesuai target	-	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	70,689,339	1 Dokumen	70,689,344	1 Dokumen	72,464,210	4 Dokumen	80,000,000		
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai target	-	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	101,731,545	2 Dokumen	101,731,529	8 Dokumen	403,463,074		
2	13	04			<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang terpenuhi Administrasi Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>479,481,000</b>	<b>100%</b>	<b>483,478,950</b>	<b>100%</b>	<b>487,576,800</b>	<b>100%</b>	<b>491,777,150</b>	<b>100%</b>	<b>2,524,389,891</b>		
							<b>Jumlah Desa yang seharusnya terpenuhi administrasi pemerintahan</b>													
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan sesuai target</b>	-	82 Desa	479,481,000	82 Desa	483,478,950	82 Desa	487,576,800	82 Desa	491,777,150	82 Desa	2,524,389,891		
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai target	-	10 Dokumen	40,000,000	20 Dokumen	40,000,000	20 Dokumen	40,000,000	32 Dokumen	40,000,000	82 Dokumen	160,000,000		
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang menyusun produk hukum sesuai target	-	82 Dokumen	30,000,000	82 Dokumen	30,000,000	82 Dokumen	30,000,000	82 Dokumen	30,000,000	82 Dokumen	200,000,000		
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai target	-	82 Dokumen	35,000,000	82 Dokumen	35,000,000	82 Dokumen	35,000,000	82 Dokumen	35,000,000	82 Dokumen	140,000,000		

2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa sesuai target	-	82 Dokumen	50,000,000	82 Dokumen	53,997,947	82 Dokumen	58,095,797	82 Dokumen	62,296,147	82 Dokumen	224,389,891		
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sesuai target	-	112 Orang	40,000,000	164 Orang	40,000,000	164 Orang	40,000,000	164 Orang	40,000,000	604 Orang	160,000,000		
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Musyawarah sesuai target	-	82 Laporan	25,000,000	82 Laporan	25,000,000	82 Laporan	25,000,000	82 Laporan	25,000,000	82 Laporan	100,000,000		
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang mengevaluasi pengawasan Peraturan Desa sesuai target	-	82 Laporan	20,000,000	82 Laporan	20,000,000	82 Laporan	20,000,000	82 Laporan	20,000,000	82 Laporan	400,000,000		
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa sesuai target	-	7 Dokumen	20,000,000	7 Dokumen	20,000,000	7 Dokumen	20,000,000	7 Dokumen	20,000,000	7 Dokumen	140,000,000		
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai target	-	2 Laporan	35,000,000	4 Laporan	35,000,000	3 Laporan	35,000,000	4 Laporan	35,000,000	13 Laporan	140,000,000		
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai target	-	1 Laporan	25,000,000	2 Laporan	25,000,000	2 Laporan	25,000,000	3 Laporan	25,000,000	8 Laporan	100,000,000		
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Desa yang melakukan Penyusunan Profil sesuai target	-	82 Dokumen	50,000,000	82 Dokumen	50,000,000	82 Dokumen	50,000,000	82 Dokumen	50,000,000	82 Dokumen	200,000,000		
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi manajemen Pemerintahan Desa sesuai target	-	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	10,000,000	9 Dokumen	40,000,000		
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang menyusun dokumen hasil pengelolaan Aset Desa sesuai target	-	10 Dokumen	35,000,000	10 Dokumen	35,000,000	15 Dokumen	35,000,000	20 Dokumen	35,000,000	55 Dokumen	140,000,000		
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sesuai target	-	82 Orang	30,000,000	82 Orang	30,000,000	82 Orang	30,000,000	82 Orang	30,000,000	82 Orang	120,000,000		
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pembinaan penyusunan laporan Kepala Desa sesuai target	-	82 Laporan	19,481,000	82 Laporan	19,481,003	82 Laporan	19,481,003	82 Laporan	19,481,003	82 Laporan	200,000,000		
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang dievaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa sesuai target	-	10 Dokumen	15,000,000	20 Dokumen	15,000,000	20 Dokumen	15,000,000	32 Dokumen	15,000,000	82 Dokumen	60,000,000		

2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga yang mendapatkan pemberdayaan	100%	100%	282,129,600	100%	284,482,100	100%	286,893,300	100%	289,364,800	100%	1,142,869,800		
							Jumlah Lembaga X 100 % yang seharusnya mendapatkan pemberdayaan													
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi	Jumlah Lembaga Desa yang terfasilitasi sesuai target	-	1 Lembaga	282,129,600	2 Lembaga	284,482,100	2 Lembaga	286,893,300	2 Lembaga	289,364,800	7 Lembaga	1,142,869,800		
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai target	-	3 Lembaga	25,000,000	5 Lembaga	25,000,000	5 Lembaga	25,000,000	5 Lembaga	25,000,000	18 Lembaga	100,000,000		
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat sesuai target	-	2 Buah	17,000,000	4 Buah	19,352,410	3 Buah	19,352,382	4 Buah	19,352,374	13 Buah	75,057,166		
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sesuai target	-	5 Dokumen	30,000,000	10 Dokumen	30,000,000	13 Dokumen	30,000,000	15 Dokumen	30,000,000	43 Dokumen	120,000,000		
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai target	-	2 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	7 Laporan	80,000,000		
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa sesuai target	-	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	8 Dokumen	120,000,000		
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sesuai target	-	2 Dokumen	160,129,600	2 Dokumen	160,129,690	2 Dokumen	162,540,918	2 Dokumen	165,012,426	8 Dokumen	647,812,634		

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran perlu dianalisa pengukuran pencapaian kinerja sehingga data kinerja yang dihasilkan dari Program dan Kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), Formula Pengukuran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo menggunakan beberapa metode pengukuran yaitu :

- ❖ Persentase adalah bagian dari keutuhan yang dinyatakan dengan persen atau bagian yang diperkirakan dengan menggunakan angka persen.
- ❖ Jumlah adalah menghitung beberapa banyak tentang sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu dalam artiannya mengukur menggunakan metode angka.

**FORMULA PENGUKURAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOALEMO**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Pengukuran
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik	1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	$\frac{\text{Hasil Pelaksanaan kegiatan program penunjang administrasi perkantoran}}{\text{Target Pelaksanaan kegiatan program penunjang administrasi perkantoran}} \times 100 \%$

		1	06	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$
				01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai target
				01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai target
				01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai target
		1	06	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$

				01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sesuai target
				01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sesuai target
		<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu</b>	<b>Jumlah Dokumen yang telah diselesaikan</b> $\frac{\text{Jumlah Dokumen yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$
				01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai target
		<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian PD yang telah diselesaikan</b> $\frac{\text{Jumlah Administrasi Kepegawaian PD yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$
		1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan sesuai target



			01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sesuai target
			01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai target
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor</b>	$\frac{\text{Jumlah Perlengkapan PD yang tersedia}}{\text{Jumlah Kebutuhan Perlengkapan PD setahun}} \times 100 \%$	
			01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sesuai target
			01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai target
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD}}{\text{Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD}} \times 100 \%$	

				01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan sesuai target
				01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sesuai target
				01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sesuai target
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	<b>Tersedianya Jasa Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan dalam setahun</b> X 100 % <b>Jumlah Jasa Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan dalam setahun</b>
				01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai target
				01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sesuai target
				01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sesuai target

1	06	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	Kondisi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik
							$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD}} \times 100 \%$
		01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sesuai target
		01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sesuai target
		01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara sesuai target
		01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sesuai target
		01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sesuai target

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat	Terselesainya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	1	06				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>		
		1	06	02			<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan</b> $\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya Mendapatkan Pemberdayaan}} \times 100 \%$
		1	06	02	2,01		<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT</b>	<b>Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</b> $\frac{\text{Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Keluarga pada KAT yang seharusnya Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$
		1	06	02	2,01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai target

		1	06	02	2,01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai target
		<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2,01</b>		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai target</b>
		1	06	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai target
		<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai target</b>
		1	06	02	2,02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai target

		1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	$\frac{\text{Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang seharusnya Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}} \times 100 \%$
		1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sesuai target
		1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal sesuai target
		1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun sesuai target
		1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai target

		1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga sesuai target
		1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial sesuai target
		1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sesuai target
		1	06	04	2,01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas sesuai target
		1	06	04	2,01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar sesuai target
		1	06	04	2,01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan sesuai target

		1	06	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan sesuai target
		1	06	04	2,01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga sesuai target
		1	06	04	2,01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan sesuai target
		<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>2,02</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial sesuai target</b>
		1	06	04	2,02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan sesuai target
		1	06	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan sesuai target
		1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal sesuai target



		1	06	04	2,02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun sesuai target
		1	06	04	2,02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan sesuai target
		1	06	04	2,02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti sesuai target
		1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial sesuai target
		1	06	04	2,02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA sesuai target

		1	06	04	2,02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS sesuai target
		1	06	04	2,02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar sesuai target
		1	06	04	2,02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga sesuai target
		1	06	04	2,02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga sesuai target
		1	06	04	2,02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan sesuai target

		1	06	04	2,02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota sesuai target
		<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>			<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b> $\times 100\%$ <b>Jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>
		<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>	<b>2,01</b>		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Jumlah PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Jumlah PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai target</b>
		1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau sesuai target
		1	06	05	2,01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan sesuai target
		1	06	05	2,01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara sesuai target
		<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>	<b>2,02</b>		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik</b>	<b>Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik sesuai target</b>

		1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata sesuai target
		1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota sesuai target
		1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sesuai target
		1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat sesuai target
Meningkatkan perlindungan dan jaminan pelayanan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>			<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</b>	<b>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani kebutuhan dasarnya</b> <hr/> <b>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang seharusnya tertangani kebutuhan dasarnya sesuai target</b> X 100 %

		1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat	Jumlah sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat yang tersedia	X 100 %
									Jumlah sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat yang seharusnya tersedia	
		1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) sesuai target	
		1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana sesuai target	
		1	06	06	2,01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian	Jumlah Tempat Pengungsian sesuai target	
		1	06	06	2,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan sesuai target	

		1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial sesuai tagret
		<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>2,02</b>		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana</b>	<b>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana sesuai target</b>
		1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana sesuai target
		1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana sesuai target
Mengembangkan dan memulihkan perekonomian masyarakat perdesaan	Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa	<b>2</b>	<b>13</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
	Meningkatnya kerjasama dan keberdayaan lembaga kemasyarakatan	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>02</b>			<b>Program Penataan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Tertata secara Representatif</b>	<b>Jumlah Desa yang tertata secara representatif</b> $\frac{\text{Jumlah Desa yang seharusnya tertata secara representatif}}{\text{Jumlah Desa yang tertata secara representatif}} \times 100 \%$

2	13	02	2,01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik	Jumlah Desa yang tertata dengan baik sesuai target
2	13	02	2,01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa sesuai target
2	13	02	2,01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan Wilayahnya sesuai target
2	13	02	2,01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya sesuai target
2	13	02	2,01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penamaan dan Kode Desa sesuai target
2	13	02	2,01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Desa yang melakukan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa adat kewenangannya sesuai target
2	13	02	2,01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan prasarana Desa sesuai target

		2	13	03			<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang melakukan Peningkatan Kerjasama Desa</b> $\frac{\text{Jumlah Desa yang seharusnya melakukan Peningkatan Kerjasama Desa}}{\text{Jumlah Desa yang seharusnya melakukan Peningkatan Kerjasama Desa}} \times 100 \%$
		2	13	03	2,01		<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Jumlah Kerja Sama antar Desa yang Terfasilitasi</b>	<b>Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Kerja sama antar Desa</b>
		2	13	03	2,01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar Desa dalam Kabupaten sesuai dengan target
		2	13	03	2,01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten sesuai target
		2	13	03	2,01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai target
		2	13	04			<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang terpenuhi Administrasi Pemerintahan</b> $\frac{\text{Jumlah Desa yang terpenuhi administrasi pemerintahan}}{\text{Jumlah Desa yang terpenuhi administrasi pemerintahan}} \times 100 \%$



2	13	04	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan sesuai target
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Administarsi Pemerintahan Desa sesuai target
2	13	04	2,01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang menyusun produk hukum sesuai target
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai target
2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa sesuai target
2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sesuai target
2	13	04	2,01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Musyawarah sesuai target
2	13	04	2,01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang mengevaluasi pengawasan Peraturan Desa sesuai target

		2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa sesuai target
		2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai target
		2	13	04	2,01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai target
		2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Desa yang melakukan Penyusunan Profil sesuai target
		2	13	04	2,01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi manajemen Pemerintahan Desa sesuai target
		2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang menyusun dokumen hasil pengelolaan Aset Desa sesuai target
		2	13	04	2,01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sesuai target
		2	13	04	2,01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pembinaan penyusunan laporan Kepala Desa sesuai target

		2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang dievaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa sesuai target
		2	13	05			<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan</b>	<b>Jumlah Lembaga yang mendapatkan pemberdayaan</b>  <b>X 100 %</b>
									<b>Jumlah Lembaga yang seharusnya mendapatkan pemberdayaan</b>
		2	13	05	2,01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi</b>	<b>Jumlah Lembaga Desa yang terfasilitasi sesuai target</b>

		2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai target
		2	13	05	2,01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat sesuai target
		2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sesuai target

		2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai target
		2	13	05	2,01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa sesuai target
		2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sesuai target



3	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100%	20%	40%	60%	80%	100%
4	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	100%	20%	40%	60%	80%	100%
5	Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Desa yang Tertata secara Representatif	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	Persen	N/A	2,4%	4,9%	7,3%	9,8%	9,8%
8	Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran diatas, maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase PMKS yang terselesaikan permasalahan kesejahteraan sosial	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat makanan dan sandang	Orang	4682	4682	4682	4682	4682	4682
3	Persentase Desa yang terfasilitasi terkait Penataan Desa dan Administrasi Desa	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	738	738	738	738	738	738
6	Nilai SAKIP OPD	Predikat	B	B	BB	BB	A	A



## BAB VIII

### P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Sosial dan PMD Kab. Boalemo Tahun 2023-2026 disusun sebagai pedoman, penentu arah, sasaran, tujuan bagi dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan urusan sosial dan PMD, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD.

Rencana strategis ini sebagai rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan dinas social dan PMD dilakukan melalui analisa masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah melalui strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada RPD Tahun 2023-2026.

Keberhasilan dari penyusunan renstra ini dapat terpenuhi melalui komitmen seluruh pihak penyelenggara, masyarakat dan stakeholder, substansi yang terkandung dalam dokumen renstra dapat dilakukan peninjauan kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan apabila ada variable-variable yang tidak mampu di realisasikan atau diprediksi dalam kurun waktu penyelenggaraan tidak dapat terpenuhi

Demikian penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2023 - 2026 diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Dinas selanjutnya.

Masih banyak kekurangan dalam penyusunan maupun penulisan renstra ini, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan dokumen renstra dinas social dan PMD Tahun 2023-2026.

Tilamuta, April 2022

**KEPALA DINAS**  
  
**Dra. MONRU MOPANGGA**  
NIP. 19660903 199702 2 002